



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 /PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 1.055.149.085.712,00 bertambah sejumlah Rp 9.826.128.321,43 sehingga menjadi Rp. 1.064.975.214.033,43 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp | 1.055.149.085.712,00 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>9.826.128.321,43</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | | Rp 1.064.975.214.033,43 |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp | 1.107.692.843.794,43 | |
| b. Berkurang | Rp | <u>4.463.005.615,26</u> | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp <u>1.112.155.849.409,69</u> |
| Defisit setelah Perubahan | | | Rp 47.180.635.376,26 |

| | | | |
|--|----|-------------------------|-----------------------------|
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp | 53.310.008.082,43 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>5.113.122.706,17</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp 48.196.885.376,26 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | Rp | 766.250.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>250.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp <u>1.016.250.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | | | Rp <u>47.180.635.376,26</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|----|-------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 57.711.776.999,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.849.107.805,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | | Rp 59.560.884.804,00 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp | 767.402.712.246,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>9.357.763.071,43</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | | Rp 776.760.475.317,43 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp | 235.034.596.467,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>6.380.742.555,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp 228.653.853.912,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | | | |
|--|----|-------------------------|----------------------|
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 11.452.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>700.100.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | | Rp 12.152.100.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 35.338.147.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>4.588.800.350,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp 39.926.947.350,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.020.800.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>475.681.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 1.496.481.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp | 4.900.829.999,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.084.526.455,00</u> | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp 5.985.356.454,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | | |
|--|----|-------------------------|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil | | | |
| 1) Semula | Rp | 57.903.130.246,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>9.660.543.071,43</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp 67.563.673.317,43 |
| b. Dana Alokasi Umum | | | |
| 1) Semula | Rp | 634.712.282.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>302.780.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | | Rp 634.409.502.000,00 |

| | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| c. Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1) Semula | Rp | 74.787.300.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | | Rp 74.787.300.000,00 |
| (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. Hibah | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| b. Dana Darurat | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1) Semula | Rp | 37.332.218.600,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>10.555.137.878,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | | Rp 47.887.356.478,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1) Semula | Rp | 181.152.541.028,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>17.056.782.708,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | | Rp 164.095.758.320,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya : | | | |
| 1) Semula | Rp | 16.549.836.839,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>120.902.275,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | | | Rp 16.670.739.114,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 805.812.621.254,00

2) Berkurang Rp 19.540.676.133,74

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 786.271.945.120,26

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula Rp 301.880.222.540,43

2) Bertambah Rp 24.003.681.749,00

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 325.883.904.289,43

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 718,795.965.614,00

2) Berkurang Rp 26.791.521.133,74

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 692.004.444.480,26

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 85.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 85.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 11.503.521.500,00

2) Bertambah Rp 3.287.382.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 14.790.904.000,00

| | | | | |
|--|----|--------------------------|----|--------------------|
| e. Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| 1) Semula | Rp | 25.997.060.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>2.410.000.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | | Rp | 28.407.060.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | | | |
| 1) Semula | Rp | 2.088.574.140,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>136.500.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | | | Rp | 2.225.074.140,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | | | |
| 1) Semula | Rp | 45.342.500.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>416.962.500,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | | | Rp | 45.759.462.500,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | | | | |
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.000.000.000,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | | Rp | 3.000.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | | | | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 28.101.630.750,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>70.312.400,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp | 28.671.943.150,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 1) Semula | Rp | 124.595.701.734,43 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>14.179.667.967,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | | Rp | 138.775.369.701,43 |

| | | | | |
|--|----|-------------------------|----|--------------------|
| c. Belanja Modal | | | | |
| 1) Semula | Rp | 149.182.890.056,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>9.253.701.382,00</u> | | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | | Rp | 158.463.591.438,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 48.196.885.376,26

| | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 53.310.008.082,43 | | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>5.113.122.706,17</u> | | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp | 48.196.885.376,26 |

b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.016.250.000,00

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 766.250.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>200.000.000,00</u> | | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp | 1.016.250.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 45.355.931.197,26

| | | | | |
|--|----|-------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 52.935.308.082,43 | | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>7.579.376.885,17</u> | | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp | 45.355.931.197,26 |

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

| | | | | |
|--|----|-------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|----|-------------------------|---------------------|
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| d. | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| e. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| f. | Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 2.840.954.179,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 374.700.000,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>2.466.254,179,00</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | | | Rp 2.840.954.179,00 |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 600.000.000,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 350.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>250.000.000,00</u> | |
| | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | | Rp 600.000.000,00 |

| | | | | |
|----|--|----|----------------|-------------------|
| c. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah Rp 416.250.000,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 416.250.000,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | | | Rp 416.250.000,00 |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah Rp 0,00 | | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| | | |
|----------|------|---|
| Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran | VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| Lampiran | VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| Lampiran | IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 3 November 2011 Nomor 7.

An. BUPATI PONOROGO
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD.

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.~~
NIP. 19640707 199303 1 008